

Peran regulasi Pemerintah Daerah dalam optimalisasi belanja daerah untuk meningkatkan daya saing sektor unggulan Kabupaten Gunungkidul

Bagas Wiranata^{1*}, Agus Widarjono²

¹Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta, Indonesia

²Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Bisnis dan Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

*Corresponding author: 22918013@students.uui.ac.id

JEL Classification Code:

H72, R58, O25

Kata kunci:

Regulasi Pemerintah Daerah, Belanja Daerah, Daya Saing, Sektor Unggulan,

Email penulis:

agus.widarjono@uui.ac.id

DOI:

10.20885/JKEK.vol4.iss1.art3

Abstract

Purpose – This study aims to analyze the competitiveness enhancement of key sectors in Gunungkidul Regency during the 2014–2023 period and to formulate strategic recommendations for future policy improvement.

Methods – The research employs a shift-share analysis and Pearson correlation test to examine the relationship between development expenditure, private investment, and regional economic growth.

Findings – The findings indicate that development expenditure has a positive correlation with economic growth. However, its effectiveness largely depends on appropriate allocation policies and the quality of budget implementation.

Implication – Local governments need to strengthen strategies for optimizing development expenditure, focusing on infrastructure development, workforce training, and technological innovation to enhance the competitiveness of key sectors.

Originality – This study contributes to the enhancement of sectoral competitiveness in Gunungkidul Regency by applying a combination of shift-share analysis and Pearson correlation methods.

Abstrak

Tujuan – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peningkatan daya saing sektor unggulan di Kabupaten Gunungkidul selama periode 2014–2023, serta merumuskan rekomendasi strategis untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang.

Metode – Penelitian ini menggunakan metode analisis shift-share dan uji korelasi Pearson untuk mengkaji hubungan antara belanja pembangunan, investasi swasta, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Temuan – Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pembangunan memiliki korelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kebijakan alokasi serta implementasi anggaran yang tepat dan terarah.

Implikasi – Pemerintah daerah perlu memperkuat strategi optimalisasi belanja pembangunan dengan menitikberatkan pada peningkatan infrastruktur, pelatihan tenaga kerja, serta pengembangan inovasi teknologi guna mendorong peningkatan daya saing sektor unggulan.

Orisinalitas – Penelitian ini memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan daya saing sektor unggulan di Kabupaten Gunungkidul melalui penerapan metode shift-share dan uji korelasi Pearson secara simultan.

Pendahuluan

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, paradigma pengelolaan pemerintahan di Indonesia telah mengalami pergeseran signifikan ke arah desentralisasi. Kebijakan ini memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan anggarannya secara mandiri. Namun, implementasi otonomi daerah ini tidak serta-merta menghasilkan peningkatan kesejahteraan dan daya saing yang merata. Salah satu tantangan utama adalah memastikan belanja pembangunan daerah dan investasi swasta mampu mendorong pertumbuhan sektor unggulan secara optimal.

Kabupaten Gunungkidul, yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, memiliki luas wilayah 1.485,36 km² dan populasi sebanyak 751.011 jiwa (BPS Gunungkidul, 2024). Daerah ini memiliki potensi ekonomi yang signifikan di sektor pertanian, pariwisata, dan industri kecil menengah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2024), pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunungkidul mencapai 5,52% pada 2023. Namun, tantangan besar masih dihadapi dalam memaksimalkan sinergi antara belanja pembangunan dan investasi untuk mendukung sektor-sektor unggulan.

Belanja pembangunan merupakan instrumen strategis dalam menciptakan infrastruktur dasar dan layanan publik yang dibutuhkan untuk mendukung sektor unggulan. Berdasarkan teori belanja pembangunan (Musgrave & Musgrave, 1989), alokasi anggaran publik yang efektif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor-sektor prioritas. Selain itu, investasi swasta memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan kapasitas produksi dan daya saing ekonomi.

Nilai investasi di Kabupaten Gunungkidul terus meningkat sejak 2016, mencerminkan kontribusi swasta yang semakin besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Berikut disajikan data belanja pembangunan dan investasi swasta selama periode 2014–2023.

Table 1. Perbandingan Belanja Pembangunan dan Investasi Swasta (BPS Gunungkidul, 2024)

Tahun	Belanja Pembangunan (Miliar)	Investasi Swasta (Miliar)
2014	342,00	20,75
2015	478,20	23,65
2016	479,51	63,37
2017	688,61	84,36
2018	634,50	122,93
2019	939,69	185,65
2020	646,89	273,60
2021	717,00	282,83
2022	749,99	475,35
2023	487,13	629,17

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa belanja pembangunan mengalami fluktuasi dengan tren yang tidak konsisten. Sebaliknya, investasi swasta menunjukkan peningkatan signifikan, terutama sejak 2016, dengan kenaikan dari Rp 63,37 miliar pada 2016 menjadi Rp 629,17 miliar pada 2023. Pergeseran ini menandakan meningkatnya kontribusi swasta sebagai penggerak ekonomi utama di Kabupaten Gunungkidul.

Untuk menganalisis kontribusi sektor ekonomi terhadap pertumbuhan daerah, digunakan analisis *shift-share* (Harris & Todaro, 1970). Metode ini mengidentifikasi faktor regional (*regional share*), sektor unggulan (*industrial mix*), dan keunggulan kompetitif lokal (*competitive share*). Menurut BPS Gunungkidul, 2024 menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap menjadi penggerak utama dengan kontribusi 24,94% terhadap PDRB pada 2023. Namun, sektor ini lebih didorong oleh keunggulan regional daripada keunggulan kompetitif. Sebaliknya, sektor konstruksi dan informasi & komunikasi menunjukkan pertumbuhan berbasis keunggulan kompetitif yang didukung oleh peningkatan investasi swasta.

Berdasarkan Laporan *World Economic Forum* (2023) menunjukkan bahwa daya saing Indonesia masih tertinggal di beberapa aspek, termasuk inovasi dan adopsi teknologi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi daerah seperti Gunungkidul untuk meningkatkan kapasitas

inovasi dalam sektor unggulannya, sekaligus menegaskan pentingnya regulasi yang mendorong inovasi dan pengembangan teknologi di tingkat local.

PDRB Kabupaten Gunungkidul menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor unggulan, diikuti konstruksi (9,00%) dan informasi & komunikasi (8,85%) pada 2023 (BPS Gunungkidul, 2024). Namun, rendahnya kapasitas inovasi dan efisiensi pasar pada IDSD yang dirilis oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional/BRIN (2024) menunjukkan perlunya pendekatan strategis untuk mengintegrasikan belanja pembangunan dan investasi swasta. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sinergi antara belanja pembangunan dan investasi swasta, menggunakan analisis shift share guna meningkatkan daya saing sektor unggulan di Kabupaten Gunungkidul. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Penelitian ini melibatkan integrasi konsep otonomi daerah, desentralisasi fiskal, dan teori daya saing. Otonomi daerah tidak hanya memperkuat akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, tetapi juga meningkatkan relevansi dan efisiensi regulasi lokal (Rachmad et al., 2023). Namun, hal ini memerlukan sistem transfer fiskal yang tepat untuk mengatasi ketidakseimbangan dan memastikan distribusi sumber daya yang adil di seluruh wilayah (Khusaini, 2018). Dengan adanya regulasi yang efektif dari pemerintah daerah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi, inovasi, dan pengembangan sektor unggulan (Purba et al., 2023).

Metode Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS), dokumen APBN dan LKJIP Kabupaten Gunung Kidul, dokumen kebijakan dan regulasi pemerintah daerah, dan wawancara dengan pejabat daerah.

Table 2. Operasional Data Penelitian

Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Indikator	Sumber data	Teknik Pengumpulan data	Teknik Analisis Data
Perubahan Sektor Ekonomi	Perubahan yang terjadi pada sektor-sektor ekonomi di Gunungkidul selama periode 2014-2023	Laju Pertumbuhan Sektor	BPS, Dokumen APBD, LKJIP	Analisis Data Sekunder	Analisis Shift-Share
Belanja Pembangunan	Alokasi anggaran pembangunan daerah dalam struktur APBD yang digunakan untuk mendukung sektor unggulan selama periode 2014-2023	- Proporsi Belanja Pembangunan - Realisasi Anggaran Pembangunan	Dokumen APBD Kabupaten Gunungkidul	Analisis Data Sekunder	Korelasi Shift-Share dengan Belanja Pembangunan
Regulasi Pemerintah Daerah	Peraturan dan kebijakan daerah yang mendukung sektor unggulan dan mengoptimalkan belanja pembangunan.	Regulasi yang Mendukung Sektor Unggulan	Dokumen Kebijakan Daerah, SK Bupati, Peraturan Daerah	Dokumentasi, Wawancara	Analisis Kualitatif
Daya Saing Sektor Unggulan	Kemampuan sektor-sektor tertentu untuk bersaing dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah selama periode 2014-2023	- Kontribusi Sektor Terhadap PDRB - Tingkat Pertumbuhan Sektor Unggulan	BPS, LKJIP	Analisis Data Sekunder, Wawancara	Analisis Deskriptif dan Korelasi

Metode *Shift-Share* (SS)

Analisis *Shift-Share* digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur perubahan struktur ekonomi Kabupaten Gunungkidul relatif terhadap perekonomian provinsi atau nasional dengan komponen sebagai berikut.

1. *Regional Share* digunakan untuk mengukur perubahan total dalam suatu variabel ekonomi di tingkat daerah.
2. *Proportional Share* digunakan untuk mengukur kinerja suatu sektor
3. *Differential Share* digunakan untuk membantu dalam menentukan seberapa jauh daya saing industri
4. *Net Shift* digunakan untuk membantu dalam menentukan cepat atau lambatnya pertumbuhan suatu sektor
5. *Shift Share* digunakan untuk membantu dalam menentukan pertumbuhan yang terjadi secara keseluruhan dalam suatu sektor

Adapun persamaan yang digunakan untuk menghitung seluruh komponen tersebut adalah sebagai berikut.

$$RS_{ij} = Y_{ij0} \times \left(\frac{Y_t}{Y_0} - 1 \right) \quad (1)$$

$$PS_{ij} = Y_{ij0} \times \left(\frac{Y_{it}}{Y_{i0}} - \frac{Y_t}{Y_0} \right) \quad (2)$$

$$DS_{ij} = Y_{ij0} \times \left(\frac{Y_t}{Y_0} - \frac{Y_{it}}{Y_{i0}} \right) \quad (3)$$

$$NS_{ij} = PS_{ij0} + DS_{ij} \quad (4)$$

$$SS_{ij} = rS_{ij0} + PS_{ij} + DS_{ij} \quad (5)$$

Dengan:

Y_t : PDRB wilayah referensi pada tahun terakhir pengamatan

Y_0 : PDRB wilayah referensi pada tahun pertama pengamatan

Y_{it} : PDRB wilayah referensi untuk sektor ke-i pada tahun terakhir pengamatan

Y_{i0} : PDRB wilayah referensi untuk sektor ke-i pada tahun pertama pengamatan

Y_{ijt} : PDRB wilayah analisis untuk sektor ke-i pada tahun terakhir pengamatan

Y_{ij0} : PDRB wilayah analisis untuk sektor ke-i pada tahun pertama pengamatan

Korelasi Sektor Unggulan

Analisis ini dilakukan untuk melihat hubungan antara sektor-sektor unggulan yang telah ditentukan melalui analisis *shift-share* di Kabupaten Gunungkidul pada PDRB, belanja pembangunan, investasi swasta, dan pertumbuhan penduduk. Persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut.

$$r = \frac{\sum(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum(x_i - \bar{x})^2 \sum(y_i - \bar{y})^2}} \quad (6)$$

Dengan:

r : Koefisien korelasi

x_i : Nilai pada variabel x observasi ke-i

\bar{x} : Nilai rata-rata pada variabel x

y_i : Nilai pada variabel y observasi ke-i

\bar{y} : Nilai rata-rata pada variabel y

Uji t untuk Korelasi Pearson

Korelasi hanya menunjukkan seberapa kuat hubungan linear antara kedua variabel, tetapi belum menjelaskan apakah hubungan tersebut cukup berarti secara statistik. Dengan kata lain, korelasi

yang diperoleh mungkin hanya terjadi karena kebetulan dari sampel data yang dianalisis atau mencerminkan hubungan nyata antara variabel.

Untuk menguji signifikansi korelasi ini, digunakan uji t. Uji t bertujuan untuk menentukan apakah nilai korelasi yang dihasilkan signifikan pada tingkat probabilitas tertentu, biasanya 5% atau 0,05 dan derajat bebas sebesar $n - 2$. Jika hasil uji t menunjukkan bahwa korelasi tersebut signifikan, maka kita dapat menyimpulkan bahwa hubungan antara belanja pembangunan dan sektor unggulan tidak terjadi secara kebetulan. Uji t untuk korelasi menggunakan formula sebagai berikut.

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}} \quad (7)$$

Dengan:

t : Nilai hasil pengujian

r : Koefisien korelasi

n : Panjang data

Interpretasi hasil korelasi akan mengikuti panduan dari Evans (1996), yang memberikan klasifikasi kekuatan hubungan berdasarkan nilai koefisien korelasi.

Hasil dan Pembahasan

Analisis *Shift-Share*

Dengan menggunakan analisis *shift-share* (SS), akan tergambarkan perkembangan kinerja dari masing-masing sektor PDRB di wilayah Gunung Kidul. Hasil analisis *shift-share* terbagi menjadi beberapa komponen, yaitu *Regional Share* (RS), *Proportional Share* (PS), *Differential Share* (DS), *Net Shift* (NS), dan *Shift Share* (SS). Penggunaan analisis SS dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk memperoleh sektor-sektor yang termasuk ke dalam sektor unggulan di Kabupaten Gunungkidul berdasarkan hasil perhitungan masing-masing komponennya. Berikut hasil dari analisis *shift-share* untuk Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2014-2023.

Tabel 3. Hasil Analisis *Shift-Share*

Sektor PDRB	RS	PS	DS	NS	SS
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.692	-0.845	0.742	-0.103	0.589
Pertambangan dan Penggalian	0.045	-0.051	0.018	-0.032	0.012
Industri Pengolahan	0.280	-0.214	0.246	0.032	0.312
Pengadaan Listrik dan Gas	0.003	0.006	-0.003	0.003	0.006
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.005	-0.002	0.005	0.003	0.008
Konstruksi	0.276	0.067	0.156	0.223	0.499
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0.270	-0.083	0.261	0.178	0.448
Transportasi dan Pergudangan	0.156	-0.101	0.172	0.071	0.227
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.166	-0.048	0.273	0.225	0.390
Informasi dan Komunikasi	0.266	0.922	-0.054	0.868	1.134
Jasa Keuangan dan Asuransi	0.061	-0.010	0.078	0.068	0.129
Real Estate	0.102	-0.008	0.085	0.077	0.179
Jasa Perusahaan	0.015	0.005	0.004	0.009	0.024
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0.261	-0.237	0.218	-0.020	0.241
Jasa Pendidikan	0.192	0.079	0.109	0.187	0.379
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.062	0.088	0.041	0.129	0.191
Jasa lainnya	0.103	0.101	0.135	0.236	0.339

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat lima sektor yang tergolong sebagai sektor unggulan, yaitu sektor konstruksi, sektor jasa perusahaan, sektor jasa pendidikan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan sektor jasa lainnya. Sektor unggulan dilihat dari nilai masing-masing komponen analisis *shift-share*, yaitu ketika seluruh komponen memiliki nilai positif.

Sektor konstruksi di Gunungkidul menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dan sejalan dengan rata-rata wilayah. Hasil penelitian, didapatkan nilai SS (0,499) pada sektor ini menunjukkan bahwa tren pertumbuhan di tingkat provinsi disebabkan karena faktor biaya tenaga kerja, bahan

baku lokal, dan kebijakan daerah turut memperkuat daya saing sektor ini. Keberlanjutan sektor konstruksi sangat penting untuk mendukung pengembangan infrastruktur. Sektor jasa perusahaan tumbuh sejalan dengan ekonomi lokal dan mendapat manfaat dari tren bisnis di Yogyakarta dengan nilai RS (0,015). Daya saingnya didorong oleh pengembangan layanan bisnis skala kecil-menengah berbasis kebutuhan lokal. Meski kontribusinya relatif kecil, sektor ini memiliki potensi besar untuk tumbuh lebih lanjut dengan inovasi dan pengembangan layanan. Sektor jasa pendidikan berkembang pesat dengan nilai RS (0,192) dan berkontribusi signifikan terhadap ekonomi, didukung oleh tren pendidikan di Yogyakarta dan keunggulan kompetitif lokal seperti biaya pendidikan yang lebih rendah serta kualitas pengajaran yang meningkat. Keberlanjutan sektor ini penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Nilai SS (0,191) menunjukkan adanya tren permintaan layanan kesehatan di tingkat provinsi dan peningkatan aksesibilitas serta dukungan pemerintah memperkuat sektor ini. Pengembangannya dapat dilakukan melalui peningkatan infrastruktur kesehatan, pelatihan tenaga medis, dan kerja sama dengan sektor swasta. Sektor jasa lainnya juga tumbuh seiring ekonomi lokal, didorong oleh pariwisata, hiburan, dan layanan masyarakat. Daya saingnya diperkuat oleh kekayaan budaya dan destinasi wisata. Dengan nilai SS (0,339) menunjukkan bahwa potensi pariwisata dan ekonomi kreatif pada sektor ini dapat terus dikembangkan untuk memberikan dampak ekonomi yang lebih besar.

Hubungan antara Belanja Pembangunan dan Sektor Unggulan

Berikut merupakan hasil analisis korelasi antara PDRB dan belanja pembangunan di Kabupaten Gunungkidul.

Tabel 4. Korelasi antara PDRB dan Belanja Pembangunan

Sektor PDRB	Correlation	T-Value	P-Value
Konstruksi	0.792	3.675	0.006
Jasa Perusahaan	0.674	2.583	0.032
Jasa Pendidikan	0.732	3.040	0.016
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.810	3.907	0.004
Jasa lainnya	0.851	4.590	0.002

Berdasarkan tabel di atas, sektor konstruksi memiliki korelasi 0,792 dengan P-Value lebih kecil dari 0,05, menunjukkan hubungan yang kuat dan positif yang menandakan bahwa perubahan yang terjadi pada PDRB dan belanja pembangunan saling berbanding lurus. Regulasi seperti Perbup Nomor 27 dan 29 Tahun 2017 pemerintah mendukung pembangunan infrastruktur, mendorong pertumbuhan sektor konstruksi secara konsisten. Sektor jasa perusahaan memiliki korelasi 0,674 dengan P-Value lebih kecil dari 0,05, menunjukkan hubungan yang kuat dan positif yang menandakan bahwa perubahan yang terjadi pada PDRB dan belanja pembangunan saling berbanding lurus. Kebijakan seperti Perda Nomor 5 Tahun 2013 dan Perda Nomor 12 Tahun 2017 memfasilitasi investasi dan pengembangan usaha. Sektor jasa pendidikan memiliki korelasi 0,732 dengan P-Value lebih kecil dari 0,05, menunjukkan hubungan yang kuat dan positif yang menandakan bahwa perubahan yang terjadi pada PDRB dan belanja pembangunan saling berbanding lurus. Dukungan Perda Nomor 6 Tahun 2020 serta kebijakan inovasi mempercepat pembangunan dan pemerataan pendidikan. Hal tersebut, mencerminkan bahwa sektor pendidikan sebagai bentuk kontribusi pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.. Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial memiliki korelasi 0,810 dengan P-Value lebih kecil dari 0,05, menunjukkan hubungan yang kuat dan positif yang menandakan bahwa perubahan yang terjadi pada PDRB dan belanja pembangunan saling berbanding lurus. Regulasi seperti Perbup Nomor 46-49 Tahun 2023 memperkuat layanan kesehatan dan bantuan sosial. Sektor jasa lainnya memiliki korelasi 0,851 dengan P-Value lebih kecil dari 0,05, menunjukkan hubungan yang kuat dan positif yang menandakan bahwa perubahan yang terjadi pada PDRB dan belanja pembangunan saling berbanding lurus. Didukung Perda Pariwisata dan Perda Industri, sektor ini berkembang pesat melalui pariwisata dan ekonomi kreatif. Semua sektor menunjukkan hubungan positif dan

signifikan antara belanja pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, menegaskan pentingnya kebijakan daerah dalam mendorong sektor unggulan.

Hubungan antara Investasi Swasta dan Sektor Unggulan

Berikut merupakan hasil analisis korelasi antara PDRB dan investasi swasta di Kabupaten Gunungkidul.

Tabel 5. Korelasi antara PDRB dan Investasi Swasta

Sektor PDRB	Correlation	T-Value	P-Value
Konstruksi	0.488	1.582	0.152
Jasa Perusahaan	0.442	1.392	0.201
Jasa Pendidikan	-0.648	-2.404	0.043
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.174	0.499	0.631
Jasa lainnya	0.134	0.384	0.711

Berdasarkan tabel di atas, sektor konstruksi memiliki korelasi 0,488 dengan P-Value lebih dari 0,05, menunjukkan hubungan yang cukup kuat dan perubahan angka PDRB dan investasi swasta saling berbanding lurus, tetapi belum signifikan secara statistik. Dampak investasi swasta mungkin tertunda karena alokasi yang tidak merata atau proyek jangka panjang. Sektor jasa perusahaan memiliki korelasi 0,442 dengan P-Value lebih dari 0,05, menunjukkan hubungan yang cukup kuat dan perubahan angka PDRB dan investasi swasta saling berbanding lurus, namun belum signifikan. Skala investasi yang masih kecil atau daya saing sektor ini di Gunungkidul bisa menjadi penyebabnya. Sektor jasa pendidikan memiliki korelasi -0,648 dengan P-Value lebih kecil dari 0,05, menunjukkan hubungan yang cukup kuat dan perubahan PDRB dan pertumbuhan ekonomi untuk sektor ini saling berbanding terbalik. Korelasi negatif ini mungkin disebabkan oleh rendahnya investasi swasta, sementara PDRB meningkat dari sumber lain seperti pengeluaran pemerintah atau partisipasi pendidikan. Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial memiliki korelasi 0,174 dengan P-Value lebih dari 0,05, menunjukkan hubungan yang lemah dan tidak signifikan, kemungkinan karena investasi swasta di sektor ini cenderung bersifat tidak langsung dan kontribusi terhadap PDRB belum memberikan dampak nyata. Sektor jasa lainnya memiliki korelasi 0,134 dengan P-Value lebih dari 0,05, menunjukkan hubungan yang lemah dan tidak signifikan, yang mungkin disebabkan oleh sifat sektor yang heterogen sehingga investasi swasta tersebar tanpa dampak langsung terhadap PDRB. Investasi swasta memainkan peran penting dalam mempercepat pengembangan sektor unggulan dimana menurut Markuat (2020), investasi swasta yang terarah pada sektor unggulan tidak hanya meningkatkan efisiensi perekonomian lokal, tetapi juga mendukung pertumbuhan sektor-sektor yang memiliki keunggulan kompetitif.

Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Unggulan

Berikut merupakan hasil analisis korelasi antara PDRB dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gunungkidul.

Tabel 6. Korelasi antara PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi

Sektor PDRB	Correlation	T-Value	P-Value
Konstruksi	0.230	0.668	0.523
Jasa Perusahaan	0.247	0.720	0.492
Jasa Pendidikan	-0.525	-1.746	0.119
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.124	0.353	0.733
Jasa lainnya	0.472	1.516	0.168

Berdasarkan tabel di atas, sektor konstruksi memiliki korelasi 0,230 dengan P-Value lebih dari 0,05, menunjukkan hubungan yang lemah dan tidak signifikan antara PDRB dan pertumbuhan ekonomi. Faktor eksternal seperti kebijakan fiskal atau sifat proyek jangka panjang sehingga mungkin dampaknya akan terasa lama. Sektor jasa perusahaan memiliki korelasi 0,247 dengan P-Value lebih dari 0,05, juga menunjukkan hubungan yang lemah dan tidak signifikan, kemungkinan

karena sektor ini lebih bergantung pada permintaan pasar nasional atau internasional. Sektor jasa pendidikan memiliki korelasi $-0,525$ dengan P-Value lebih dari $0,05$, menunjukkan hubungan yang cukup kuat dan berbanding terbalik, namun tidak signifikan, kemungkinan akibat ketergantungan besar pada anggaran publik atau pengalihan prioritas anggaran. Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial memiliki korelasi $0,124$ dengan P-Value lebih dari $0,05$, menunjukkan hubungan yang lemah dan tidak signifikan, mungkin karena sektor ini lebih bergantung pada pengeluaran pemerintah atau donasi. Sektor jasa lainnya memiliki korelasi $0,472$ dengan P-Value lebih dari $0,05$, menunjukkan hubungan yang cukup kuat dan berbanding lurus, namun belum signifikan secara statistik. Sektor ini mencakup hiburan, pariwisata, dan layanan kecil yang lebih responsif terhadap konsumsi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, regulasi yang mendukung kemudahan berusaha sangat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, dimana menurut Stimson et al. (2006) bahwa regulasi yang transparan dan akuntabel mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi swasta, sehingga memaksimalkan kontribusinya terhadap sektor unggulan.

Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Unggulan

Berikut merupakan hasil analisis korelasi antara belanja pembangunan dan investasi swasta di Kabupaten Gunungkidul.

Tabel 7. Korelasi antara Belanja Pembangunan dan Investasi Swasta

Sektor PDRB	Correlation	T-Value	P-Value
Konstruksi	0.605	2.148	0.064
Jasa Perusahaan	0.258	0.756	0.472
Jasa Pendidikan	-0.612	-2.190	0.060
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-0.237	-0.689	0.510
Jasa lainnya	-0.090	-0.257	0.804

Berdasarkan tabel di atas, sektor konstruksi memiliki korelasi $0,605$ dengan P-Value lebih dari $0,05$, menunjukkan hubungan yang cukup kuat namun tidak signifikan antara belanja pembangunan dan investasi swasta. Pembangunan infrastruktur dapat mendorong investasi swasta, tetapi faktor lain mungkin memengaruhi realisasinya. Sektor jasa perusahaan memiliki korelasi $0,258$ dengan P-Value lebih dari $0,05$, menunjukkan hubungan yang lemah dan tidak signifikan, karena sektor ini lebih bergantung pada dinamika pasar dan kebutuhan spesifik bisnis lain dibandingkan investasi publik. Sektor jasa pendidikan memiliki korelasi $-0,612$ dengan P-Value lebih dari $0,05$, menunjukkan hubungan yang cukup kuat dan berbanding terbalik, namun tidak signifikan, kemungkinan karena dominasi belanja pemerintah mengurangi insentif investasi swasta. Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial memiliki korelasi $-0,237$ dengan P-Value lebih dari $0,05$, menunjukkan hubungan yang cukup kuat dan berbanding terbalik, namun tidak signifikan, karena sektor ini lebih bergantung pada intervensi pemerintah dan layanan non-komersial. Sektor jasa lainnya memiliki korelasi $-0,090$ dengan hubungan yang lemah dan tidak signifikan, kemungkinan karena heterogenitas sektor ini serta pengaruh faktor pasar yang lebih dominan dibandingkan belanja pembangunan.

Hubungan antara Belanja Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi

Berikut merupakan hasil analisis korelasi antara belanja pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gunungkidul.

Tabel 8. Korelasi antara Belanja Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi

Sektor PDRB	Correlation	T-Value	P-Value
Konstruksi	0.540	1.816	0.107
Jasa Perusahaan	0.188	0.540	0.604
Jasa Pendidikan	-0.663	-2.506	0.037
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-0.221	-0.641	0.539
Jasa lainnya	0.296	0.875	0.407

Berdasarkan tabel di atas, sektor konstruksi memiliki korelasi 0,540 dengan P-Value lebih dari 0,05, menunjukkan hubungan yang cukup kuat namun tidak signifikan antara belanja pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Meskipun tidak signifikan, belanja pembangunan sektor ini mendorong pertumbuhan karena sifat padat karya dan material. Sektor jasa perusahaan memiliki korelasi 0,188 dengan P-Value lebih dari 0,05, menunjukkan hubungan yang lemah dan tidak signifikan, karena sektor ini lebih dipengaruhi oleh dinamika pasar dan investasi swasta. Sektor jasa pendidikan memiliki korelasi -0,663 dengan P-Value lebih kecil dari 0,05, menunjukkan hubungan negatif yang signifikan, mungkin karena alokasi belanja pembangunan yang lebih banyak untuk sektor lain daripada pendidikan dan belanja pembangunan tidak tepat sasaran dalam sektor pendidikan. Sektor kesehatan dan kegiatan sosial memiliki korelasi -0,221 dengan P-Value lebih dari 0,05, menunjukkan hubungan lemah dan tidak signifikan, mungkin karena kurangnya alokasi yang efektif untuk sektor ini. Sektor jasa lainnya memiliki korelasi 0,296 dengan P-Value lebih dari 0,05, menunjukkan hubungan lemah dan tidak signifikan, karena sektor ini dipengaruhi oleh faktor lain seperti konsumsi rumah tangga dan investasi swasta.

Hubungan antara Investasi Swasta dan Pertumbuhan Ekonomi

Berikut merupakan hasil analisis korelasi antara investasi swasta dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gunungkidul.

Tabel 9. Korelasi antara Investasi Swasta dan Pertumbuhan Ekonomi

Sektor PDRB	Correlation	T-Value	P-Value
Konstruksi	0.847	4.505	0.002
Jasa Perusahaan	0.642	2.371	0.045
Jasa Pendidikan	0.759	3.297	0.011
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.870	4.994	0.001
Jasa lainnya	0.748	3.183	0.013

Berdasarkan tabel di atas, sektor konstruksi memiliki korelasi 0,847 dengan P-Value lebih kecil dari 0,05, menunjukkan hubungan yang sangat kuat dan signifikan antara investasi swasta dan pertumbuhan ekonomi, yang mungkin didorong oleh proyek konstruksi yang menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas. Sektor jasa perusahaan memiliki korelasi 0,642 dengan P-Value lebih kecil dari 0,05, menunjukkan hubungan kuat dan signifikan antara investasi swasta dan pertumbuhan ekonomi, yang berkontribusi melalui modal fisik, pelatihan, dan teknologi. Sektor jasa pendidikan memiliki korelasi 0,759 dengan P-Value lebih kecil dari 0,05, menunjukkan hubungan kuat dan signifikan, dengan peningkatan investasi swasta yang berpotensi memperbaiki kualitas pendidikan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Sektor kesehatan dan kegiatan sosial memiliki korelasi 0,870 dengan P-Value lebih kecil dari 0,05, menunjukkan hubungan sangat kuat dan signifikan yang berkontribusi melalui peningkatan kualitas layanan kesehatan yang dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan. Sektor jasa lainnya memiliki korelasi 0,748 dengan P-Value lebih kecil dari 0,05, menunjukkan hubungan kuat dan signifikan, dengan investasi swasta yang mendukung sektor-sektor seperti pariwisata dan ekonomi kreatif, berpotensi meningkatkan lapangan kerja dan konsumsi masyarakat.

Evaluasi Regulasi dan Strategi Pembangunan Sektor Unggulan

Evaluasi regulasi dan strategi optimalisasi pembangunan sektor unggulan di Kabupaten Gunungkidul didasarkan pada analisis belanja pembangunan, investasi swasta, dan pertumbuhan ekonomi. Hasil analisis shift-share menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap menjadi penyumbang utama PDRB, sehingga regulasi yang mendukung inovasi teknologi sangat diperlukan untuk meningkatkan produktivitas. Belanja pembangunan berperan signifikan dalam mendukung infrastruktur dasar, sehingga regulasi harus memastikan alokasi anggaran diarahkan pada sektor prioritas untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja daerah. Investasi swasta juga memainkan peran penting dalam pengembangan sektor unggulan, karena dapat meningkatkan efisiensi ekonomi lokal dan mendorong sektor dengan keunggulan kompetitif.

Regulasi yang transparan dan akuntabel diperlukan untuk menciptakan lingkungan investasi yang kondusif, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat berkelanjutan. Sinergi antara belanja pembangunan dan investasi swasta terbukti berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sejalan dengan teori belanja pembangunan yang menekankan efisiensi alokasi anggaran publik guna mendukung infrastruktur dan inovasi. Oleh karena itu, regulasi daerah harus mempertimbangkan kebutuhan lokal dan peluang pertumbuhan jangka panjang. Belanja pembangunan yang tepat sasaran, terutama pada infrastruktur dasar seperti jalan dan fasilitas produksi, dapat mempercepat pertumbuhan sektor unggulan seperti pariwisata dan agribisnis. Selain itu, investasi swasta yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi mengindikasikan perlunya kolaborasi lebih erat antara pemerintah daerah dan sektor swasta guna menciptakan sinergi yang optimal.

Sebagai langkah tindak lanjut, rekomendasi strategis berikut dapat diimplementasikan:

1. Reformasi Regulasi
Menyederhanakan prosedur perizinan untuk menarik lebih banyak investasi di sektor unggulan. Hal ini sejalan dengan penelitian Black (2002), yang menunjukkan bahwa regulasi yang sederhana dapat meningkatkan minat investor. Reformasi ini dapat mencakup digitalisasi proses perizinan dan penetapan standar layanan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.
2. Kemitraan Publik-Swasta (PPP)
Meningkatkan kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam pengembangan sektor unggulan. Ridwan (2014) menekankan pentingnya kemitraan ini untuk memastikan kesinambungan investasi. Model kemitraan ini dapat melibatkan penyediaan dana bersama untuk proyek strategis, seperti pengembangan destinasi wisata atau pengolahan hasil pertanian.
3. Penguatan Kapasitas Lokal
Melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan untuk meningkatkan akseptabilitas dan dampak positif regulasi terhadap masyarakat. Pelibatan ini dapat diwujudkan melalui program pelatihan keterampilan, pemberdayaan usaha kecil, dan penyediaan akses pembiayaan mikro.
4. Peningkatan Monitoring dan Evaluasi
Mengembangkan mekanisme monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan untuk menilai efektivitas regulasi dan strategi pembangunan. Sistem ini dapat mencakup indikator kinerja utama (*Key Performance Indicators*) yang terkait dengan daya saing sektor unggulan dan tingkat investasi.

Dengan pendekatan ini, regulasi dan strategi optimalisasi pembangunan dapat berperan sebagai pendorong utama dalam meningkatkan daya saing sektor unggulan di Kabupaten Gunungkidul. Penerapan strategi ini tidak hanya akan memperkuat ekonomi lokal, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, pengurangan kesenjangan sosial, dan keberlanjutan lingkungan.

Kesimpulan dan Implikasi

Berdasarkan hasil analisis, sektor unggulan di Kabupaten Gunungkidul meliputi konstruksi, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan jasa lainnya. Sektor-sektor ini menunjukkan pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan sektor lain dan memiliki potensi besar dalam mendukung perekonomian daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa belanja pembangunan memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan sektor konstruksi dan jasa lainnya, tetapi dampaknya terhadap sektor jasa pendidikan dan kesehatan cenderung bervariasi. Hal ini mengindikasikan bahwa efektivitas belanja pembangunan bergantung pada alokasi anggaran dan implementasi kebijakan yang tepat sasaran. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih spesifik untuk mengoptimalkan dampak belanja pembangunan pada sektor pendidikan dan Kesehatan.

Dalam hal ini, regulasi daerah berperan penting dalam mendukung sektor unggulan melalui kebijakan anggaran di bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Namun, terdapat kendala dalam menarik investasi swasta yang lebih luas. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam penyusunan regulasi yang lebih adaptif serta peningkatan transparansi dan efektivitas implementasi kebijakan daerah.

Untuk meningkatkan daya saing sektor unggulan, pemerintah daerah perlu memperkuat strategi optimalisasi belanja pembangunan dengan fokus pada peningkatan infrastruktur, pelatihan tenaga kerja, dan pengembangan inovasi teknologi. Selain itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta guna menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih kompetitif dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Abqa, M. A. R., Hutabarat, S. A., Suhariyanto, D., Fauziah, N. M., Khilmi, E. F., Meliana, Y., & Muhtar, M. H. (2023). *Hukum Tata Negara: Sebuah Konsep Dasar Dalam Menata Bangsa*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gunungkidul. (2023). Kabupaten Gunungkidul dalam Angka 2023. BPS Kabupaten Gunungkidul.
- BPS. (2024). Kabupaten Gunung Kidul dalam Angka 2024. Badan Pusat Statisti
- BRIN. (2024). Indeks Daya Saing Daerah 2023. Badan Riset dan Inovasi Nasional. Jakarta
- Khusaini, M. (2018). *Keuangan daerah*. Universitas Brawijaya Press
- Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. (2023). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2022. Pemkab Gunungkidul.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Purba, O., Syamil, A., Nooraini, A., Sepriano, S., & Gunawan, A. F. (2023). *Dasar Hukum & Analisis Tata Kelola Ibu Kota Negara Dari Berbagai Bidang*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Rachmad, A. F., Azaria, E., Xusan, Q. N., & Azzahra, N. (2023). *Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Daerah*. Jurnal Penelitian Serambi Hukum, 16(02), 75-88.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Stimson, R.J., Stough, R.R., & Roberts, B.H. (2006). *Regional Economic Development: Analysis and Planning Strategy*. Berlin: Springer.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice*. New York: McGraw-Hill.
- World Economic Forum. (2023). *The Global Competitiveness Report 2023*. WEF.